

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Penjatuhan Sanksi administratif bagi Penunggak Retribusi Pelayanan Pemakaman di Tunggul Hitam Kota Padang, maka penulis menyimpulkan:

1. Penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman di tunggu hitam kota Padang tidak sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan bahwa :
 - a. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - b. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
 - c. Tata cara Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
2. Jasa pemakain retribusi pelayanan pemakaman dibayar setiap 2 tahun / I periode, jika ada masyarakat yang tidak membayar jasa retribusi pelayanan pemakaman akan dikenai sanksi administrasi. Penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman di Tunggul Hitam terdapat 3 (Tiga) Tahap, yaitu:
 - a. Surat Teguran Pertama
 - b. Surat Teguran Kedua
 - c. Surat Teguran ketiga

Sanksi Administrasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Tunggul Hitam tidak mengenal adanya denda, jadi apabila masyarakat menggunggung akan mendapatkan surat teguran yang akan dikeluarkan pihak pemakaman. Surat tersebut akan diberikan pihak pemakaman kepada pihak ahli waris yang menggunakan jasa retribusi pelayanan pemakaman tersebut.

3. Kendala yang biasanya terjadi saat Pemberian Sanksi Administrasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Tunggul Hitam Kota Padang, dimana pihak ahli waris biasanya tidak berada ditempat, sehingga pihak pemakaman hanya dapat menitipkan surat teguran kepada ketua RT/RW dimana ahli waris bertempat tinggal. Biasanya ahli waris yang tidak dapat ditemukan pihak pemakaman tersebut, ahli waris berada diluar kota padang, dan kembali pada saat lebaran, dan setelah kembali ahli waris akan melunasi sanksi administrasi pelayanan pemakaman tersebut, karena tidak ada ahli waris yang tidak peduli dengan keluarganya yang dimakamkan di wilayah tersebut.
4. Petugas Tunggu Hitam belum pernah memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang menunggak melebihi surat teguran ketiga. Karena masyarakat yang mendapatkan surat teguran ketiga biasanya akan membayar jasa retribusi tersebut tanpa adanya denda, karena pemakaman tunggul hitam tidak mengenal adanya sanksi administrasi berupa denda.

B. Saran

1. Bagi pihak pemakaman agar dapat membuat mengenai penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman di tunggul hitam, agar pelaksanaan nya sesuai dengan peraturan.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat mengontrol pemakaman tunggul hitam, agar dapat mengetahui masyarakat yang menggunggak secara detail
3. Bagi pihak pemakaman membuat peraturan jika ada pihak ahli waris yang tidak berada di Kota Padang / di luar daerah pemakaman, dapat membayar sanksi tersebut ke rekening dan dapat melaporkan telah membayar, agar tidak ada lagi masyarakat yang menunggak.

